

DKI Dapat Bantuan APD untuk Petugas Sampah Medis

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menerima bantuan berupa alat pelindung diri (APD) dari salah satu perusahaan pengolah limbah terpadu di Jakarta, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) untuk petugas sampah medis atau bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya.

"Alhamdulillah sebenarnya apresiasi sangat tinggi dari kami terhadap kolaborator yang sukarela membantu kita pada saat masa pandemi ini," kata Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rosa Ambarsari Senin (27/9).

Bantuan yang diterima di antaranya 1.020 kantong sampah, 700 hair cap, 200 sarung tangan latex, 550 sarung tangan nitrile, 2.000 masker medis dan satu alat semprot. Bantuan tersebut akan dibagikan ke seluruh petugas yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan wilayah DKI Jakarta.

Humas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Arum Pusposari mengatakan kebutuhan alat kesehatan bagi petugas di

lapangan harus mendapat perhatian khusus. Hal itu, lanjut, karena petugas yang memungut sampah medis dianggap paling rentan terpapar Covid-19.

Selain itu, jumlah sampah medis selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun semakin banyak sehingga para petugas harus lebih sering bertugas di lapangan.

Maka dari itu, pihaknya menyalurkan bantuan tersebut agar para petugas di lapangan bisa bertugas dengan aman.

"Setidaknya ini yang bisa kita lakukan untuk membantu negara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk bisa berperan memerangipandemi Covid-19," kata Arum.

Arum melanjutkan, nantinya akan terus berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah medis di DKI Jakarta. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) merupakan perusahaan investasi dari Jepang yang lima persen sahamnya dikuasai oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN dan sisanya, 95 persen oleh DOWA Jepang. ● yan

Banyak Sampah di Kali Sentiong, Diduga Biang Kerok Banjir di Johar Baru

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menemukan banyak tumpukan sampah dalam pengerukan Kali Sentiong di Johar Baru. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan, sampah yang ditemukan di sepanjang aliran kali itu jauh lebih banyak dibandingkan tumpukan lumpur.

"Rupanya di sana (Kali Sentiong) banyak sampah. Kalau lumpurnya sedikit," kata Irwandi seperti dilansir, Senin (27/9). Irwandi pun mensinyalir tumpukan sampah di Kali Sentiong ini yang kerap kali membuat wilayah Johar Baru terendam saat hujan deras.

Ia berharap dengan pengerukan kali yang dilaku-

kan Suku Dinas Sumber Daya Air dibantu Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat ini, tak lagi terjadi genangan.

"Semoga dengan ini aliran airnya lancar (di Kali Sentiong) sehingga tidak ada lagi genangan air kalau hujan deras," ucap Irwandi. Irwandi juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga lingkungannya dan tidak lagi membuang sampah di Kali Sentiong.

"Kalau buang sampahnya ke kali kan bisa macet nanti saluran airnya. Terus kalau meluap ke jalan, banjir lagi nanti," kata Irwandi. "Jadi, kami minta tolong kesadarannya jangan buang sampah ke kali," sambungnya. ● yan

FOTO: ANT



PEMBELAJARAN TATAP MUKA TAHAP DUA DI JAKARTA

Sejumlah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Lenteng Agung 07, Jakarta, Senin (27/9). Pemprov DKI Jakarta mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di 1.509 sekolah pada Senin (27/9), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masa PPKM.

Asesmen Nasional SMA, Sekolah Tatap Muka Jakarta Dihentikan

JAKARTA (IM) - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Jakarta dihentikan sementara seiring kegiatan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) tingkat SMA. PTM akan kembali digelar pada 1 Oktober mendatang.

"Sudah menjadi kebijakan dari Disdik ketika ANBK berlangsung maka PTM tidak dilaksanakan. Jadi nanti dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober, karena 27, 28, 29, 30 itu pelaksanaan ANBK tingkat SMA," kata Humas Disdik DKI Jakarta, Tega Radjagah saat dikonfirmasi, Senin (27/9).

Tega mengatakan meski pelaksanaan ANBK hanya di tingkat SMA, PTM di jenjang pendidikan lainnya turut di-

hentikan. "Karena kan bisa terjadi SMA dekat dengan SD, SMP itu yang berbahaya, takut ada interaksi atau kerumunan para siswa ini yang kita hindari," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Disdik menambah jumlah sekolah yang diizinkan untuk menggelar PTM terbatas.

Penambahan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 984 Tahun 2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM Terbatas tahap II pada masa PPKM. "Menetapkan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM campuran tahap II pada masa PPKM," dikutip dari SK, Sabtu (25/9).

Dalam SK, ada 899 sekolah yang terdiri dari 809 sekolah umum dari tingkat TK hingga SMA dan SMK, serta 90 madrasah mulai tingkat RA sampai MA, yang diizinkan untuk PTM.

Dengan tambahan ratusan sekolah itu, maka total ada 1.509 sekolah di Jakarta yang menggelar PTM. Sebelumnya, sudah ada 610 sekolah yang menggelar PTM terbatas tahap I sejak akhir Agustus lalu. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



DONOR DARAH DALAM RANGKA HUT DPD RI

Petugas PMI menunjukkan kantong darah hasil donor darah di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9). Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan HUT ke-17 DPD RI tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah di tengah kondisi pandemi.

FRAKSI GERINDRA TAK AKAN HADIR, PKS MERASA DITELIKUNG

DPRD DKI Putuskan Hak Interpelasi Formula E Hari Ini

Rapat paripurna tersebut akan mengagendakan pengusulan hak interpelasi. Dibutuhkan persetujuan dari 50% + 1 orang anggota dewan agar hak interpelasi bisa bergulir. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, hak interpelasi Formula E gagal dilaksanakan.

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memutuskan menyetujui pengajuan rapat paripurna untuk memutuskan hak interpelasi Formula E. Persetujuan tersebut diberikan oleh Pras, sapaan akrab Prasetyo, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung

Senin pagi di ruang serbaguna gedung DPRD DKI.

Pras dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, persyaratan untuk mengagendakan rapat paripurna pengusulan hak interpelasi telah terpenuhi dengan adanya dua fraksi dan minimal 15 anggota dewan yang mengajukan. Saat ini dua fraksi

yang tetap teguh mendukung hak interpelasi Formula E, yakni PDI Perjuangan dan PSI. Keseluruhan anggota kedua fraksi tersebut dengan total 33 orang pun membubuhkan tanda tangan dukungan hak interpelasi. "Setelah rencana kerja usulan-usulan semua di Bamus sudah selesai. Ada usulan dari 2 fraksi. Karena di tata tertib dikatakan 15 orang sudah cukup untuk interpelasi, diadwalkan lagi, disetujui," kata Pras, Senin (27/9).

Rapat paripurna pengusulan hak interpelasi tersebut akan digelar, Selasa (28/9). "Besok jam 10 pagi," ujarnya. Rapat paripurna tersebut akan mengagendakan pengusulan hak interpelasi. Dibutuhkan persetujuan dari 50% + 1 orang anggota dewan agar hak inter-

pelasi bisa bergulir. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, hak interpelasi Formula E gagal dilaksanakan. Sebelumnya, Fraksi PDIP dan PSI mengusulkan untuk mengulirkan hak interpelasi memprotes rencana penyelenggaraan Formula E tahun depan.

Menurut anggota Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, Formula E tidak patut dilakukan di masa pandemi covid-19 karena masyarakat banyak yang kesulitan ekonomi. Ia meminta agar rencana itu dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Selain itu, bila Formula E dilakukan di masa pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI telah memprediksikan adanya kerugian keuangan hingga ratusan miliar rupiah.

tersebut dan diputuskan secara sepihak," kata dia.

Rani mengatakan, Gerindra sangat menyayangkan keputusan tersebut dan terkesan diputuskan secara semena-mena. "Selama ini kami yang tidak ikut interpelasi tidak ada sedikit pun menghalangi jalannya interpelasi tapi rasanya kok modelnya tabrak aturan apa tidak, semakin membuat cacat arti interpelasi itu sendiri," kata dia.

Tak Sesuai Prosedur

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan penetapan jadwal rapat paripurna terkait keputusan persetujuan interpelasi Formula E. Fraksi PKS menilai dalam agenda bamus hari ini tak ada jadwal pembahasan jadwal rapat paripurna terkait interpelasi Formula E.

"Itu kan di bamus ya. Bamus itu tidak ada agenda itu. Jadi tidak ada agenda, kan surat undangan di badan musyawarah selalu pimpinan sebagai wakil kolektif kolegal itu kan selalu dibahas, ketika kita paraf kita melihat agendanya, itu nggak ada agenda interpelasi di bamusnya itu," kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Senin (27/9).

Suhaimi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI F-PKS menganggap keputusan itu tak sesuai prosedur yang berlaku. Sebab, penjadwalan interpelasi sifatnya hanya disisipkan dalam rapat. PKS pun merasa ditelak.

"Kalau gitu caranya, menu-rut saya itu mendelikung. Karena tidak ada agenda di bamus sebelumnya di dalam surat beredar itu," sambungnya.

Suhaimi menyampaikan, semestinya pembahasan mengenai interpelasi Formula E harus dijadwalkan di agenda lain, bukan disisipkan dalam agenda rapat hari ini. ● yan

Interpelasi Formula E, Anies Baswedan Diagendakan Beri Penjelasan 4 Oktober

JAKARTA (IM) - DPRD DKI Jakarta telah menetapkan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E dan mengagendakan penjelasan Gubernur Anies Baswedan pada 4 Oktober mendatang. Dalam jadwal itu, agenda interpelasi Formula E berlangsung mulai Senin (27/9) hingga 4 Oktober 2021.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI, Augustinus mengirinkan susunan agenda proses interpelasi tersebut. Surat itu diterbitkan hari ini, 27 September 2021.

"Jadwal tersebut dapat diadakan perubahan menurut perkembangan melalui persetujuan rapat Badan Musyawarah," demikian bunyi catatan dalam surat itu.

Berikut rincian proses interpelasi Formula E selanjutnya:

1. Senin, 27 September 2021
 - Penetapan jadwal rapat paripurna hak interpelasi anggota DPRD DKI
 - Kegiatan: rapat Badan Musyawarah
2. Selasa, 28 September 2021
 - Anggota dewan pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas hak usul interpelasi
 - Kegiatan: rapat paripurna DPRD DKI pukul 10.00 WIB
3. Rabu, 29 September 2021
 - Pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan pengusul terhadap interpelasi
 - Kegiatan: rapat paripurna DPRD DKI pukul 10.00 WIB
4. Rabu, 29 September 2021
 - Menyusun jawaban atas pertanyaan PU fraksi-fraksi terhadap hak interpelasi
 - Kegiatan: rapat kerja DPRD DKI pukul 14.00 WIB
5. Senin, 4 Oktober 2021
 - Jawaban atas tanggapan para anggota DPRD DKI Jakarta
 - Persetujuan dalam rapat paripurna terhadap usul interpelasi
 - Kegiatan: rapat paripurna DPRD DKI pukul 10.00 WIB
6. Senin, 4 Oktober 2021
 - Penyusunan keputusan DPRD mengenai hak interpelasi dari pimpinan DPRD kepada kepala daerah atau gubernur
 - Kegiatan: rapat paripurna DPRD DKI pukul 13.00 WIB
7. Senin, 4 Oktober 2021
 - Penjelasan kepala daerah atau gubernur terhadap hak interpelasi
 - Pertanyaan anggota DPRD
 - Kegiatan: rapat paripurna DPRD DKI pukul 13.30 WIB. ● yan

Gerindra Pastikan Tak Hadir

Ketua Fraksi Gerindra, Rani Mauliani memastikan seluruh anggota fraksinya tidak akan mengikuti rapat paripurna pembahasan hak interpelasi terkait Formula E Selasa (27/9) ini. Dia mengatakan, sikap Gerindra tetap yaitu menolak interpelasi dan akan konsisten sampai akhir.

"Tidak, pastinya, karena kita kan memilih tidak interpelasi, dari awal pun Gerindra sudah bersikap tidak memilih ikut dalam interpelasi karena itu konsisten sampai akhir," ujar Rani saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (27/9).

Rani mengatakan, agenda paripurna interpelasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pembahasan yang biasa dilakukan. Dia menyebut, dalam undangan Badan Musyawarah sudah ditandatangani pimpinan Dewan dan tidak mencantumkan pembahasan interpelasi.

"Berarti beliau (Ketua DPRD DKI) menyisipkan secara ilegal agenda (interpelasi)

Dani Ramdan Lepas Tim Sosialisasi Masker BPBD

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, memimpin apel gabungan pelepasan Tim Sosialisasi Masker bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (27/9). Turut hadir Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, dan jajaran BPBD Provinsi Jawa Barat.

Tim Sosialisasi Masker tersebut akan membagikan sebanyak 10.000 masker kepada masyarakat di 4 titik lokasi, yakni Pasar Tegal Danas, Pasar Sentra Grosir Cikarang, Pasar Bersih Cikarang Selatan, dan Pasar Serang.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Dani menjelaskan bahwa meskipun kasus sudah menurun dan percepatan vaksinasi sudah dilaksanakan, pembagian masker ini dilaksanakan agar dapat menghindari adanya kenaikan kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut, kata Dani, sejalan dengan adanya Instruksi Presiden RI untuk dapat tetap menerapkan pemakaian masker.

"Harus disosialisasikan lagi karena kasus sudah turun dan vaksin sudah cepat.

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (gambar atas) saat memimpin apel gabungan pelepasan Tim Sosialisasi Masker bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (27/9).

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia juga memerintahkan kepada kami untuk tetap menerapkan 1M, yakni menggunakan masker supaya bisa kita tahan tidak ada lagi gelombang-gelombang kasus," jelasnya dalam rilis Prokopim Setda-

"Saya harapkan dalam bagi masker dapat tambahan edukasi kepada masyarakat. Informasikan apa pentingnya masker supaya tetap terhindar dari Covid-19, dan berikan sosialisasi cara gunakan masker yang benar," harapnya.

Selain itu, dirinya meminta agar BPBD Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan kesiapsiagaannya, mengingat musim hujan yang segera datang. Ia ingin ketersediaan personil maupun peralatan dapat siaga apabila ada bencana banjir atau longsor yang mungkin terjadi di musim hujan ini.

"Saya instruksikan kepada Kepala BPBD untuk siapkan diri meningkatkan kesiapsiagaan. Personil diperiksa kesehatan dan keterampilannya, serta peralatannya juga disiapkan dari sekarang," ucapnya.

Terakhir, ia ingin kegiatan pembersihan gorong-gorong, saluran air, serta kali dapat dilakukan secara rutin dengan harapan dapat menghindari bencana banjir dan longsor tersebut.

"Lakukan kegiatan bersih-bersih di gorong-gorong saluran air kali secara rutin. Dengan upaya ini kita berharap tidak terjadi apa yang kita khawatirkan yakni bencana banjir atau longsor," tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi serta pembagian masker ini merupakan rangkaian program BPBD Provinsi Jawa Barat kepada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebelum dilaksanakannya Rapat Koordinasi bersama Kepala BPBD se-Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 28 September 2021. ● mdl

PENGUMUMAN

Direksi PT FLORA WAHANA TIRTA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditur Perseroan bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 24 September 2021 Nomor 89, yang dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan/disetero semula sebesar Rp.6.000.000.000,- menjadi Rp.15.000.000.000,- sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetero sebesar Rp.9.000.000.000,- yang diambil dari konversi Utang Perseroan kepada PT BUKIT BARISAN INDAH PRIMA selaku pemegang saham Perseroan, menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.

Direksi
PT FLORA WAHANA TIRTA

PENGUMUMAN
PENURUNAN MODAL SETOR
Direksi PT TRICONDOS SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta Pusat (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditur perseroan berdasarkan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sikuler) tertanggal 27 September 2021 memutuskan dan menyetujui atas penurunan modal setor dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kepada kreditur dan debitor dari perseroan yang keberatan dapat mengajukan keberatan kepada perseroan selama 60 hari kerja sejak penandatanganan Sikuler diadukan.
Jakarta, 27 September 2021
Direksi
Ttd
PT TRICONDOS SEJAHTERA